

Konflik Politik:
Kehidupan Kota dan Membangun Komunitas Demokrasi Lokal*

Oleh Chusnul Mar'iyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Out line only

Pendahuluan

Wajah dari kehidupan di beberapa kota di Indonesia dewasa ini, terutama di pusat-pusat kota seperti Jakarta sejak jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto diwarnai dengan adanya wajah kekerasan secara terbuka. Kenapa diktakan kekerasan terbuka karena pada masa Soeharto sebetulnya juga diwarnai oleh kekerasan terstruktur melalui institusi kekuasaan yang ada. Pada saat ini ada kecenderungan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang menginginkan untuk kembali lagi ke masa Orde Baru. Kekerasan, kerusuhan, pembakaran yang menjadi wajah kota-kota besar di Indonesia mempengaruhi proses demokratisasi yang sedang dibangun, termasuk proses pemulihan ekonomi dan membangun budaya politik demokratis. Perubahan kepemimpinan nasional pada tahun 1998 tidak menghasilkan perubahan rezim secara total. Pertama, Soeharto pergi namun sistem dan rezim Orde Baru masih terlembagakan di dalam struktur kekuasaan. Kedua, kekuatan politik di dalam masyarakat tidak memiliki oposisi yang kohesif. Akibatnya kekuatan politik tersebut yang dilakukan adalah reposisi kelompoknya masing-masing. Terlihat dengan banyaknya partai politik yang dibentuk yang lebih didasarkan pada kharisma, populisme dan agama; budaya politik patrimonial sangat kuat mewarnai tingkah laku politik. Hal ini termasuk mereka yang masa Soeharto menjadi oposan. Sementara kelompok yang berkuasa masa lalu hanya melakukan proses perlambatan agar dapat reposisi kembali.

Maraknya konflik, demonstrasi (yang sebagian seringkali diwarnai dengan kekerasan), kerusuhan di Jakarta dan didaerah perkotaan lainnya di Indonesia mewarnai proses demokrasi yang sedang kita bangun dewasa ini. Kekuatan politik seperti partai politik tidak berperan besar di dalam proses penyelesaian konflik yang ada. Perdebatan politik lebih diwarnai dengan proses perebutan kekuasaan dibandingkan dengan perdebatan kebijakan untuk melayani publik.

Tulisan singkat ini (sebagai out line saja), terutama didasarkan pada pertanyaan mendasar: *apa* penyebab utama dari konflik di Indonesia yang telah banyak menyebabkan warga negara tidak berdosa saling membunuh atas nama etnik/agama/ras, kejahatan pembakaran, penganiayaan, dan adanya pengungsian akibat konflik kekerasan di beberapa daerah. Lebih khusus bagaimana kota-kota besar di Indonesia saat ini sangat

* Tulisan ini merupakan pengembangan dari beberapa tulisan sebelumnya, dan masih dalam draft untuk dikembangkan lebih lanjut.

rentan dengan kekerasan yang ditimbulkan dari konflik tersebut di atas. *Apa* konsep dan perspektif untuk membangun dan yang dapat dipergunakan untuk memahami persoalan konflik di Indonesia dewasa ini, khususnya di daerah perkotaan. *Pendekatan apa* yang praktis untuk mentransformasikan konflik dan dapat melembagakan penyelesaian konflik sehingga terjadi perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*). Terakhir, sejauh mana membangun komunitas demokrasi pada tingkat lokal di daerah perkotaan agar proses demokrasi tanpa kekerasan dapat tercapai.

Pertanyaan mendasar untuk studi budaya politik demokratis di perkotaan adalah siapakah yang memegang kekuasaan di masyarakat kota. Lebih jauh lagi bagaimanakah kekuasaan tersebut ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan kepada warganya.

Sebelum lebih jauh perlu penjelasan tentang suatu sistem pemerintahan dikatakan demokratis adalah apabila terdapat tiga aspek penting di dalamnya. *Pertama*, adanya kompetisi antar individu/kelompok melalui partai politik. Di dalam kompetisi tersebut dilarang untuk mempergunakan kekuatan (*excluding the use of force*). *Kedua*, partisipasi penuh, yaitu setiap warga negara dewasa berhak untuk dipilih atau diangkat untuk posisi politik melalui proses berkala (pemilu). Di dalam proses tersebut tidak boleh ada suatu kelompok yang dipinggirkan. *Ketiga*, kebebasan sipil dan politik seperti kebebasan pers, kebebasan mengorganisasikan dirinya, kebebasan mengekspresikan pendapat.

“[D]emocracy...denotes a system of government that meets there essential conditions, meaningful and extensive competition among individuals and organised groups (especially political parties) for all effective positions of political power, at regular intervals and excluding the use of force; a highly inclusive level of political participation in the selection of leaders and policies, at least through regular and fair elections, such that no major (adult) social group is excluded; and a level of civil and political liberties – freedom of expression, freedom of press, freedom to form and joint organisations – sufficient to ensure the integrity of political competition and participation.” (Diamond, Lind, Lipset)

Salah satu tujuan yang penting di dalam membangun teori kritis di dalam Ilmu Sosial adalah untuk memberikan visi alternatif kepada hubungan sosial sehingga dapat menjadikan arahan tingkah laku warga. Seperti mengutip Marcuse:

Conceptualized the stuff of which the experience world consists... with a view to its possibilities, in the light of their actual limitation, suppression, and denial.
(dalam Young, halaman 226)

Studi tentang perkotaan kurang berkembang di Indonesia, terutama studi-studi tentang *community power*.

Saya percaya bahwa persoalan konflik yang bermuatan kekerasan dewasa ini membutuhkan pemahaman konsep dan pendekatan yang komprehensif. Membangun perdamaian membutuhkan komitmen yang panjang, infra struktur lintas tingkat sosial yang ada, bagaimana memberdayakan struktur sosial di masyarakat agar rekonsiliasi dari dalam masyarakat dan memaksimalkan kontribusi dari lingkungan masyarakat di luar sistem. Dengan demikian membangun perdamaian membutuhkan fondasi yang kuat dari beberapa aktor dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Kehidupan politik perkotaan:

1. kehidupan politik komunitas yang ideal secara demokratis tanpa peminggiran kelompok sosial tertentu. Kehidupan perkotaan adalah kehidupan multi etnik, multi kelompok (ras, agama dan etnik).
2. Akan tetapi kehidupan kota juga penuh dengan ketidakadilan, kelompok dominasi korporasi kapital dan birokrasi negara. Kelompok ini seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pemerintahan kota itu sendiri. Keputusan kebijakan privatisasi di kota atau daerah perkotaan menghasilkan ketidakadilan dan represi; menghasilkan segregasi dalam masyarakat dan peminggiran di dalam masyarakat kota yang pada gilirannya menghasilkan eksploitasi, marginalisasi dan imperialisme budaya.
3. Di dalam teori demokrasi perlu untuk merespons perlunya desentralisasi, bagaimana warga lokal dapat berpartisipasi di dalam proses-proses politik di wilayah daerahnya.
4. Akan tetapi tuntutan otonomi lokal tersebut tanpa pemahaman warga dengan meningkatkan *social capital*, *human capital* dan *physical capital* akan menghasilkan peminggiran warga lokal.

Memahami konflik

Konflik bisa dikelola dengan cara konstruktif tanpa kekerasan dan juga bisa secara destruktif.

1. Konflik dapat terjadi apabila paling sedikit ada dua kepentingan yang berbeda. Konflik adalah konsekuensi logis dari konstruksi sosial dari masyarakat yang dibangun dari berbagai kelompok etnik, agama dan ras berbeda. Konstruksi sosial yang seperti ini secara alami mengakibatkan perbedaan-perbedaan nilai yang secara potensial akan dapat mengakibatkan konflik. Pada konteks spasial di daerah perkotaan. konflik di perkotaan dalam transisi demokrasi ini tidak dibatasi oleh isu lokal saja, isu nasional juga berpengaruh.
2. Budaya kota: misalnya *post-modern* adanya perubahan sosial dan budaya yang merubah secara fundamental struktur hubungan sosial di perkotaan yang ditandai dengan adanya perubahan hierarki di dalam budaya, contohnya antara *high culture*, *popular culture* dan *mass culture*, art dan keseharian.
3. Otonomi daerah membawa perubahan di dalam membangun demokrasi pada tingkat lokal: *pertama*, politik lokal sangat penting dengan lebih pro aktif untuk membangun strategi pembangunan. Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat terutama di daerah perkotaan yang telah terlihat adanya respons terhadap dengan konsep *urban regime*

suatu perangkat hubungan antara publik dan privat serta *civil society* di dalam proses pengambilan keputusan. Akan menimbulkan pembagian kerja. Kota yang menjadi bagian dari pengaruh global juga lebih terfokus pada perkembangan teknologi. *Kedua* naiknya mobilisasi politik lokal untuk pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan masalah kebijakan pembangunan sosial, kualitas hidup, dan pembangunan ekonomi.

Dalam penelitian Community power secara umum pendekatan studi kasus merupakan metode yang paling banyak dipakai. Hal itu karena studi ini sebagian besar merupakan suatu penjelasan yang detail hubungan kekuasaan di kota atau dapat dikatakan studi etnografi suatu kota. Kota pada dasarnya adalah dunia konsumen internasional, warganya terdiri dari multi etnik, pilihan-pilihan sangat beragam, secara ekonomi bisa dikatakan sebagai war konsumen, terdapat fasilitas retail, mall-mall, mulai hilangnya outlet lokal, pengalaman belanja menjadi pengalaman urban.

Suatu perubahan yang penting di dalam kota adalah bagaimana kota didefinisikan kembali sebagai *'the local'*. *Community*, etnik, identitas atau sebangsanya telah menggantikan kota sebagai lokal di dalam kebijakan.

Akar persoalan konflik di Indonesia antara lain adalah:

1. Selama masa orde baru, kita dipaksa untuk mendefinisikan identitas kolektif kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan, sehingga tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat (monolitik). Salah satunya adalah SARA, segala konflik yang ada di masyarakat dengan mudah akan dimasukkan ke dalam kategori SARA. Padahal seperti yang telah disebutkan diatas bahwa konflik adalah hal yang wajar. Persoalannya adalah bagaimana menyelesaikannya. Sistem politik yang militeristik juga mendorong penyelesaian konflik dengan lebih mendasarkan pada pendekatan yang didasarkan pada kekuasaan (*power-based approach*). Contoh pendekatan militeristik diantaranya adalah menyelesaikan kasus Ambon dengan membuka KODAM baru lagi.

Sejarah represi negara selama orde baru menghasilkan ketidakpuasan yang pada gilirannya menyebabkan konflik-konflik, baik itu yang sifatnya horisontal seperti konflik antar dua etnik maupun vertikal seperti konflik antar tingkat pemerintahan (pusat vs daerah) juga baik itu yang sifatnya konflik antar dua kelompok maupun konflik multi level/ multi kelompok.

2. Di negara-negara maju lembaga peradilan menjadi wadah penyelesaian konflik. Prinsipnya akan terjadi kalah-menang melalui proses peradilan. Di Indonesia lembaga peradilan tidak memberikan jaminan kepada pencari keadilan. Hal ini disebabkan regim yang korup. Sehingga lembaga peradilan kurang dianggap mampu untuk menyelesaikan konflik, sebagai contoh kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus pelanggaran HAM di Aceh, Tim-Tim, Papua Barat, kasus Tanjung Priuk, kasus KKN mantan presiden Soeharto dsb. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan hukum di dalam menyelesaikan konflik tidak memberikan jaminan bagi pencari

keadilan. Oleh karena itu lembaga peradilan perlu mendapatkan perhatian. Disamping perlu adanya perubahan-perubahan hukum atau perundang-undangan yang lebih memperhatikan aspirasi rakyat. Menegakkan supremasi hukum seperti jargon politisi harus menjadi realitas politik di dalam negara/ masyarakat yang kita bangun dewasa ini sehingga pendekatan yang didasarkan hukum (Right-based approach) harus pula ditegakkan.

3. Persoalan konflik yang begitu kompleks permasalahannya di Indonesia dewasa ini harus dipecahkan. Salah satunya dengan lebih menitik beratkan pada pendekatan kepentingan (interest-based approach). Pendekatan ini bisa dikembangkan dengan membangun dan memperkuat civil society. Prinsipnya adalah penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan cara proses dialog tanpa kekerasan.

Peyelesaian konflik dengan pendekatan kepentingan ini melalui proses yang cukup panjang, menyangkut tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi 'stake holders' atau the convenning party
2. Mengidentifikasi visi dan tujuan yang sama: Mengapa kita harus menyelesaikan konflik yang ada.
3. Mengidentifikasi issue-issue yang ada; mendengarkan sejarah kemalangan/duka yang ada (terbunuhnya keluarga, korban penculikan, kekerasan, perkosaan, pembakaran)
4. Mengeksplorasi nilai-nilai, kebutuhan dan kepentingan yang ada
5. Menganalisa dan mensintesakan
6. Mencari solusi kreatif
7. Mencari persetujuan
8. Melakukan Action-Plan

Tentu saja proses-proses seperti tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Terutama kita masih berada dalam lingkungan yang penuh dengan saling kecurigaan (social-capital yang hancur), sementara 'human-capital' kurang mampu untuk memahami persoalan yang ada. Dengan demikian kita perlu memahami konflik dan pada saat yang sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Rekonsiliasi Membangun Indonesia di masa Depan

Konflik di Indonesia pada dasarnya memiliki karakter yang mirip antara yang satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok yang berkonflik tinggal di tingkat geografi yang berdekatan, seperti Ambon - Sumbas dimana mereka memiliki pengalaman trauma karena kekerasan. DOM di Aceh, DOM di Papua Barat, beberapa mereka harus hidup dalam ketakutan dan stereotipi yang merugikan. Pusat-pusat kota menjadi tempat yang paling rentan terhadap konflik kekerasan tersebut.

Dinamika konflik yang ada adalah contoh dari pengalaman kehidupan yang riil dimana persepsi, emosi menyatu dengan rasionalisasi dan proses mekanisme yang ada sulit untuk melakukan resolusi konflik. Sehingga hal-hal tersebut tidak menjawab

kebutuhan dari kelompok yang berkonflik tersebut ataupun merubah persepsi dari kelompok yang berkonflik tersebut.

Menurut J. Paul Ladrach – di dalam bukunya *Building Peace* – proses rekonsiliasi penting untuk dilakukan . Rekonsiliasi ini menyangkut:

- a) Truth (kebenaran)
Adanya pengakuan, transparansi dan kejelasan mengenai persolaan/issue yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut berkonflik.
- b) Justice (keadilan)
Menyangkut kesamaan hak-hak yang harus dipenuhi.
- c) Mercy (pemaafan)
Penerimaan, dukungan, healing, kesabaran.
- d) Peace (perdamaian)
Adanya harmoni, kesejahteraan, saling respek antar kelompok yang ada.

Rekonsiliasi dengan demikian dapat dipahami sebagai fokus dan lokus. Sebagai perspektif yang dibangun dengan orientasi untuk membangun hubungan antar kelompok yang lebih baik. Sebagai fenomena sosial dapat menjadi wadah dimana semua kelompok yang berkonflik bertemu. Rekonsiliasi harus pro-aktif di dalam mencari solusi. Membangun zona-zona damai di daerah perkotaan menjadi penting agar masyarakat warga tidak terjebak pada informasi rumor yang berkembang di dalam masyarakat tanpa bisa mengendalikannya.

Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita bisa membagi pengalaman bersama untuk membangun masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Women-peace* building inisiatif. Mengikutsertakan perempuan di dalam proses negosiasi proses kehidupan politik lokal menjadi elemen penting untuk mencapai demokrasi yang lebih berperspektif gender.
2. Dialog, wacana perdamaian mengidentifikasi kebutuhan, mengerti wacana-wacana yang berbeda dapat dilakukan dengan dialog. *Tawn hall meeting, pertemuan di kelurahan sebagai* alternatif saluran bagi warga untuk mengartikulasikan kepentingannya. Isu tentang Dewan kelurahan.
3. Untuk daerah-daerah yang telah hancur akibat konflik pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan dengan kerangka perencanaan yang jelas beserta kerangka waktunya. Inisiatif lokal dari Aceh menyebutkan bahwa yang dibutuhkan di Aceh bukan darurat militer tapi darurat ekonomi. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan warganya untuk mencapai kesejahteraan, dapat hidup dengan aman tanpa intimidasi dan kekerasan. Sehingga proses ttransisi ke arah demokrasi yang pada hakekatnya memiliki tiga prioritas yaitu membangun ekonomi yang lebih demokratis, membangun budaya politik yang lebih demokratis dan meminimalkan konflik yang bermuatan kekerasan dapat diwujudkan.
4. Peran media menjadi salah satu faktor penting untuk proses rekonsiliasi. Media di Aceh yang monolitik hanya memberikan wacana kekerasan yang ditampilkan

semakin memperkeruh situasi. Media masih banyak memberikan ruang yang cukup luas bagi mereka yang mempromosikan kekerasan atau perang, tapi kurang memperhatikan mereka yang membangun perdamaian (*peace making societies*). Untuk itu perlu mempromosikan *peace journalism* sebagai instrumen penting mencapai rekonsiliasi.

Tantangan yang dihadapi:

1. bagaimanakah menghadapi pertentangan antara individualisme yang tumbuh di daerah perkotaan. Bagaimana dengan bangunan komunitas yang demokratis tersebut? Teori urban regime menjadi menarik untuk dikaji kembali sebagai teori yang cukup baru di dalam melihat tentang masalah demokrasi di daerah perkotaan.
2. Seperti Foucault mengambil pendapat Rousseau yang mengatakan :

A transparent society, visible and legible in each of its parts, the dream of there no longer existing any zones of darkness, zone established by the privileges of royal power or the prerogative of some corporation, zones of disorder. It was the dream that each individual, whatever position he occupied, might be able to see the whole society, that men's hearts should communicate, their vision be unobstructed by obstacles, and that their opinion of all reign over each. (Ibid, halaman 229).

3. Konsep dan definisi komunitas seperti yang dikemukakan oleh Sandel sebagai *shared subjectivity* (dalam Young). Bagaimana kita memperdebatkannya? Di wilayah perkotaan menjadi lebih mudah karena ada unsur spasial.
4. Demokrasi yang kuat membutuhkan konsensus kreatif, melalui dialog, musyawarah sehingga dapat membuat konsensus konstruktif politik bersama.

Catatan Akhir

1. Daerah terutama di wilayah kota ini perlu untuk mempromosikan kebebasan sipil dan politik. Namun, pada saat yang sama bukan berarti mempromosikan kebebasan individu tanpa batasan-batasan hukum yang disepakati. Dengan demikian warga tidak memiliki kekuasaan untuk memarginalkan warga lain atau kelompok lain dari aktivitas di publik.
2. Perlu meningkatkan kerjasama dan *diversity* dari kelompok warga dan meminimalkan opresi dan marginalisasi.

Bahan bacaan:

MENYUSUL email: CMARIYAH@indosat.net.id